

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kalibata tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fasilitas teknis dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan, melainkan sebagai ruang sosial yang di dalamnya berlangsung interaksi, relasi kekuasaan, serta proses negosiasi antaraktor. Aktivitas pengelolaan sampah yang terjadi setiap hari mempertemukan berbagai aktor dengan latar belakang, kepentingan, dan posisi sosial yang berbeda, seperti pemulung senior, pemulung junior, pengepul, petugas TPS, serta pedagang di sekitar lokasi. Keberadaan aktor-aktor tersebut membentuk dinamika sosial yang kompleks, di mana keteraturan tidak sepenuhnya bergantung pada aturan formal, tetapi dibangun melalui praktik sosial yang terus berlangsung dan dipelajari secara kolektif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa negosiasi menjadi mekanisme utama yang memungkinkan berbagai kepentingan dapat berjalan berdampingan dalam ruang TPS yang terbatas. Negosiasi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk dialog terbuka atau perundingan resmi, melainkan hadir melalui penyesuaian perilaku, pemahaman batas kerja, serta kesepakatan tidak tertulis yang diinternalisasi oleh para aktor. Pembagian ruang pilah, pengaturan waktu aktivitas, serta akses terhadap sampah bernilai ekonomi diatur melalui pengakuan sosial yang terbentuk dari interaksi berulang. Dengan demikian, keteraturan di TPS Kalibata merupakan hasil dari proses sosial yang dinamis, bukan semata produk dari regulasi administratif.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa posisi sosial aktor sangat memengaruhi kapasitas mereka dalam proses negosiasi. Pemulung senior menempati posisi yang relatif dominan dalam struktur sosial TPS karena pengalaman kerja yang panjang dan pengakuan kolektif yang mereka peroleh. Pengalaman tersebut bertransformasi menjadi legitimasi sosial yang memungkinkan pemulung senior memiliki ruang tawar lebih besar dalam menentukan batas kerja, mengakses informasi, serta memengaruhi penyelesaian persoalan di lapangan. Sebaliknya, pemulung junior berada pada posisi yang lebih adaptif dan terbatas, sehingga cenderung menyesuaikan diri dengan struktur yang telah terbentuk demi memperoleh penerimaan sosial dan keberlangsungan kerja.

Dalam konteks relasi ekonomi, pengepul memiliki pengaruh yang signifikan karena menguasai akses terhadap harga dan pasar. Posisi ini menjadikan

pengepul sebagai aktor kunci dalam struktur negosiasi ekonomi di TPS Kalibata. Ketergantungan pemulung terhadap pengepul membentuk relasi kerja yang bersifat berkelanjutan, di mana negosiasi harga dan penerimaan barang berlangsung dalam kerangka hubungan sosial yang relatif stabil. Meskipun pengepul memiliki posisi tawar yang lebih kuat, dominasi tersebut tidak selalu diekspresikan secara terbuka, melainkan dibingkai melalui komunikasi, kepercayaan, dan penyesuaian agar relasi kerja tetap terjaga.

Peran petugas TPS dalam struktur negosiasi menunjukkan adanya perpaduan antara otoritas formal dan praktik sosial informal. Petugas membawa kewenangan administratif dalam pengelolaan TPS, namun dalam praktiknya kewenangan tersebut dijalankan secara fleksibel melalui pendekatan persuasif dan komunikasi interpersonal. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran petugas tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi juga oleh kemampuan membangun legitimasi sosial di mata aktor informal. Petugas berperan sebagai mediator yang menjaga keseimbangan antara ketertiban operasional dan keberlangsungan kerja pemulung, sehingga konflik terbuka dapat diminimalkan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kesepakatan tidak tertulis berfungsi sebagai fondasi utama keteraturan sosial di TPS Kalibata. Kesepakatan ini mencakup pembagian ruang kerja, pengakuan hierarki sosial, etika penyelesaian konflik, serta norma hubungan ekonomi antaraktor. Meskipun tidak dikodifikasikan secara formal, kesepakatan tidak tertulis memiliki daya ikat yang kuat karena didukung oleh tekanan sosial dan kepentingan bersama. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut lebih sering diselesaikan melalui teguran sosial atau mediasi informal, yang menunjukkan bahwa kontrol sosial bekerja secara laten dalam kehidupan sehari-hari di TPS.

Relasi antaraktor di TPS Kalibata pada akhirnya membentuk suatu struktur sosial yang relatif stabil meskipun bersifat informal. Struktur ini ditopang oleh distribusi posisi dan pengaruh yang tidak setara, namun dapat diterima karena dianggap wajar dan fungsional oleh para aktor. Pemulung senior, pemulung junior, pengepul, petugas TPS, dan pedagang menempati peran yang saling terkait dan bergantung satu sama lain. Ketergantungan ini mendorong aktor-aktor tersebut untuk terus melakukan penyesuaian dan negosiasi agar aktivitas pengelolaan sampah dapat berjalan tanpa gangguan berarti.

Penelitian ini menegaskan bahwa TPS Kalibata berfungsi sebagai arena sosial tempat berlangsungnya praktik kekuasaan yang tidak selalu tampak secara eksplisit. Kekuasaan bekerja melalui pengakuan, norma, dan internalisasi aturan tidak tertulis, sehingga struktur sosial dapat direproduksi tanpa konflik terbuka.

Negosiasi menjadi sarana utama dalam mengelola perbedaan kepentingan dan menjaga keseimbangan relasi. Dengan demikian, TPS tidak hanya merefleksikan persoalan teknis pengelolaan sampah, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial perkotaan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlangsungan aktivitas di TPS Kalibata sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor di dalamnya untuk membangun kesepahaman dan menjaga relasi sosial dalam kondisi keterbatasan ruang dan sumber daya. Negosiasi antaraktor memungkinkan terciptanya keteraturan sosial yang adaptif dan situasional. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial, sehingga pemahaman terhadap praktik negosiasi dan struktur sosial menjadi penting dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan pengelolaan sampah perkotaan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai negosiasi antaraktor di TPS Kalibata memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi perkotaan, khususnya dalam memahami bagaimana ruang pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai arena sosial yang kompleks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara aktor formal dan informal menghasilkan struktur sosial yang tidak sepenuhnya diatur oleh kebijakan resmi, melainkan oleh praktik negosiasi sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang perkotaan yang tampak teknis sebenarnya menyimpan dinamika sosial yang kaya dan memerlukan pendekatan analisis yang mempertimbangkan relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta norma informal.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan aturan administratif, tetapi juga oleh kemampuan aktor dalam membangun komunikasi dan kerja sama. Negosiasi menjadi mekanisme penting yang memungkinkan berbagai kepentingan dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan gangguan signifikan terhadap operasional TPS. Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap kondisi sosial lokal menjadi penting agar pengelolaan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Implikasi lain yang dapat diambil adalah perlunya pengakuan terhadap peran aktor informal dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Pemulung, pengepul, pedagang, dan pengangkut sampah swadaya memiliki kontribusi nyata dalam menjaga alur pengelolaan sampah, meskipun keberadaan mereka sering berada di luar struktur formal. Pengakuan terhadap peran tersebut dapat membuka peluang untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa TPS sebagai ruang pengelolaan sampah juga merupakan ruang sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan dan posisi sosial. Pemahaman terhadap dinamika tersebut penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial di lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dinamika negosiasi dan struktur sosial di TPS Kalibata, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait. Saran ini disusun dengan mempertimbangkan posisi, peran, serta keterlibatan masing-masing aktor dalam praktik pengelolaan sampah sehari-hari, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis maupun konseptual.

1. Saran ditujukan kepada pemerintah daerah dan pihak pengelola TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keteraturan sosial di TPS Kalibata tidak hanya ditopang oleh aturan formal, tetapi juga oleh kesepakatan tidak tertulis dan praktik negosiasi yang telah terbentuk secara sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan TPS yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial aktor informal. Pendekatan pengelolaan yang terlalu administratif dan kaku berpotensi mengabaikan mekanisme sosial yang justru menjaga stabilitas aktivitas di lapangan. Pengakuan terhadap keberadaan dan peran pemulung serta pengepul sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah perkotaan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan pengelolaan TPS yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pengelola TPS disarankan untuk tidak hanya menitikberatkan evaluasi pada aspek teknis seperti volume sampah dan kebersihan lingkungan, tetapi juga pada aspek relasi sosial antaraktor. Pemahaman terhadap pola interaksi, hierarki informal, serta potensi konflik dapat membantu pengelola dalam merumuskan kebijakan operasional yang lebih adaptif. Dengan demikian, TPS tidak diperlakukan semata sebagai ruang kerja teknis, melainkan sebagai ruang sosial yang memerlukan pengelolaan berbasis pemahaman sosial dan komunikasi.
2. Saran ditujukan kepada petugas TPS sebagai aktor kunci yang berada di garis depan pengelolaan TPS. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran petugas TPS sangat menentukan keberlangsungan aktivitas karena mereka berada di antara tuntutan aturan formal dan realitas sosial aktor informal. Oleh karena itu, petugas TPS disarankan untuk terus mengembangkan pendekatan komunikasi dan mediasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemampuan membaca situasi sosial, membangun dialog, dan melakukan negosiasi menjadi keterampilan penting yang melengkapi kewenangan administratif yang dimiliki. Petugas TPS juga disarankan untuk memperkuat perannya sebagai

penengah dalam situasi konflik, baik antar pemulung maupun antara pemulung dan aktor lain. Pendekatan persuasif yang telah diterapkan selama ini terbukti lebih efektif dalam menjaga keteraturan dibandingkan tindakan represif. Dengan mengedepankan komunikasi interpersonal dan pemahaman terhadap kondisi ekonomi aktor informal, petugas TPS dapat membangun legitimasi sosial yang memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial TPS. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara ketertiban operasional dan keberlangsungan kerja aktor informal.

3. Saran ditujukan kepada aktor informal, khususnya pemulung dan pengepul. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan posisi dan pengaruh, keberlangsungan aktivitas di TPS Kalibata sangat bergantung pada relasi kerja yang saling bergantung. Oleh karena itu, pemulung dan pengepul disarankan untuk terus menjaga komunikasi dan kesepahaman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kesadaran akan ketergantungan timbal balik dapat membantu mencegah konflik terbuka yang berpotensi mengganggu stabilitas kerja bersama. Pemulung senior diharapkan dapat terus menjalankan peran sosialnya dalam menjaga keteraturan dan membantu proses adaptasi pemulung junior. Sementara itu, pemulung junior disarankan untuk secara aktif membangun relasi dan memahami norma sosial yang berlaku agar dapat meningkatkan posisi sosialnya secara bertahap. Bagi pengepul, menjaga hubungan kerja yang adil dan transparan dengan pemulung dapat memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan pasokan. Hubungan kerja yang didasarkan pada komunikasi yang baik akan lebih mampu bertahan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial di TPS.
4. Masyarakat sebagai pihak yang menghasilkan sampah memiliki peran penting dalam membentuk dinamika yang terjadi di TPS. Penelitian ini menunjukkan bahwa volume dan jenis sampah yang masuk ke TPS sangat dipengaruhi oleh perilaku warga dalam membuang dan memilah sampah dari rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk mulai menerapkan praktik pemilahan sampah sejak dari sumbernya serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak sosial dari aktivitas pembuangan sampah. Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga dengan keberlangsungan kerja para aktor informal yang bergantung pada nilai ekonomis sampah. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa TPS bukan sekadar tempat pembuangan akhir sementara, melainkan ruang kerja bagi berbagai aktor yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sampah. Dengan membuang sampah sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, masyarakat dapat membantu menjaga keteraturan aktivitas di TPS serta mengurangi potensi konflik antaraktor. Partisipasi aktif warga dalam program kebersihan lingkungan juga

dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pengelola TPS, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

5. Saran ditujukan kepada peneliti selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup lokasi dan fokus aktor, sehingga membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk memperluas kajian. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada TPS di wilayah lain guna melihat variasi pola negosiasi dan struktur sosial dalam konteks yang berbeda. Perbandingan antar wilayah dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kebijakan lokal, kondisi sosial, dan karakteristik aktor memengaruhi praktik pengelolaan sampah.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis mengenai dimensi kekuasaan, gender, atau kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan. Pendekatan etnografi jangka panjang juga dapat digunakan untuk menangkap dinamika interaksi secara lebih mendalam. Dengan demikian, kajian mengenai TPS sebagai arena sosial tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu sosiologi perkotaan, tetapi juga dapat memberikan masukan yang relevan bagi perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih adil dan berkelanjutan.

